



Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan Pemilu 2019

Musthofa¹⁾ Indiana Ngenget²⁾

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP) Jakarta

musthofamakhdor@gmail.com¹⁾

indiana.inge@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan pada pemilu 2019. Metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka (*library research*). Temuan penelitian, Proses penjurangan caleg PKS dilakukan tertutup melalui penugasan (*assignment*). Caleg yang diusung adalah kader yang ditugaskan oleh struktur partai untuk berjuang terpilih sebagai anggota legislatif. Proses rekrutmen caleg PKS tidak mengacu pada popularitas dan elektabilitas seorang tokoh, adakalanya seseorang yang tidak terkenal dan mempunyai keterbatasan secara finansial, PKS mempunyai pertimbangan tersendiri untuk memilih. Model kaderisasi /rekrutmen politik PKS ini yang berbeda dengan partai politik lain, yang dilakukan secara terbuka. Kader yang terpilih sebagai caleg telah melewati penilaian berjenjang, dipilih mengacu amanah kader, orientasinya adalah pengabdian, sehingga didapati relevansi model rekrutmen PKS Tangsel yang berdasar *assignment* dalam menghasilkan anggota dewan berkualitas. Peningkatan perolehan suara PKS dalam Pemilu 2019 merupakan hasil pola rekrutmen PKS Kota Tangsel, sehingga mendorong peningkatan perolehan suara partai, diperkuat oleh dinamika politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 serta politik di tingkat pusat (nasional), sehingga PKS mendapat keuntungan karena suara masyarakat Kota Tangerang Selatan beralih memilih PKS.

Kata Kunci : *Partai Keadilan Sejahtera, Pemilu 2019, Pola Rekrutmen*

PENDAHULUAN

Menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2019, Partai-partai politik peserta pemilu sibuk melakukan proses rekrutmen politik yang bertujuan menarik masyarakat menjadi anggota partainya. Almond menjelaskan bahwa partai politik mempunyai prosedur-prosedur tertentu untuk melakukan rekrutmen, tetapi calon-calon dalam jabatan politik biasanya cenderung berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas, maka migrasi tokoh parpol dari satu partai ke partai lain menjadi fenomena yang biasa (Almond, 1993).

Proses rekrutmen kader partai yang instan ini pada akhirnya menimbulkan banyak masalah, pembagian kartu tanda anggota (KTA) parpol pada masyarakat tanpa melalui Training Orientasi Partai (TOP) hanya membuat masyarakat menjadi objek dari sistem politik yang berlaku. Proses rekrutmen politik (pendaftaran caleg secara terbuka melalui pengumuman di koran, tv, dll) yang terkesan "asal-asalan" pada akhirnya menghasilkan kualitas kepemimpinan yang kurang bermutu. Hal ini terjadi karena para caleg kurang memahami *platform* perjuangan partainya dan menganggap bahwa partai politik hanya sekedar alat untuk mencapai kekuasaan. Dengan model rekrutmen seperti ini, maka para caleg yang berkompetisi pada pemilu legislatif biasanya mempunyai kemapanan secara ekonomi dan finansial.

Di dalam sistem politik yang sudah maju, sangat jarang terjadi kasus seorang pemimpin partai politik yang beralih dari satu partai ke partai yang lain, sedangkan pergerakan kelompok-kelompok sosial

dan kelas dari satu partai ke partai yang lain merupakan satu proses panjang yang teramat kompleks (Huntington, 2004). Di tengah sistem politik yang sedang berkembang, perpindahan antar partai di tengah-tengah individu dan kelompok merupakan satu gejala yang sangat umum terjadi. Di Indonesia misalnya tokoh-tokoh politik seringkali berpindah secara timbal balik antara dua partai yang besar. Pimpinan politik ditingkat lokal secara khas bergabung dengan partai politik yang memenangkan pemilihan umum di tingkat daerah (pilkada) ataupun tingkat nasional. Sementara pimpinan politik tingkat nasional seringkali bergeser dari satu partai ke partai lain dalam hubungannya dengan prospek suara pemilih yang akan mendukungnya pada pemilu 2019.

Pemilihan umum adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pemerintahan demokratis. Secara umum, negara demokratis wajib mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakilinya di pemerintahan (Darmawan, 2013). Dalam sistem demokrasi kita, Partai Politik merupakan salah satu instrumen terpenting dari pelaksanaan sistem politik demokrasi yang modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut dengan keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPRD/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Pada dasarnya tujuan utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Surbakti, 2010), adapun cara yang digunakan oleh partai politik dalam sistem demokrasi konstitusional untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu).

Alan Ware (1996), menganggap keberadaan partai politik dalam dinamika politik di negara modern adalah suatu keniscayaan. Selain itu keberadaan partai politik juga penting karena merupakan institusi yang membawa rakyat mencapai tujuan bersama dengan cara menjalankan kekuasaan di dalam negara. Definisi tersebut menekankan bahwa keberadaan partai politik di pemerintahan merupakan sarana terpenting untuk memainkan pengaruh dan hal ini pula yang membedakannya dengan *pressure groups* (kelompok-kelompok penekan). Pada umumnya partai politik akan mengikuti pemilu untuk menunjukkan realitas kekuatan politiknya (Sitaresmi, 2013).

Salah satu diantara fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen dan pencalonan kandidat politik (DPR/DPRD). Setiap partai politik berusaha mendukung calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Setelah partai politik mencalonkan kandidat maka partai politik akan memobilisasi pemilih untuk mendukung kandidat tersebut. Disinilah letak peran signifikan partai politik dalam sistem demokrasi, kualitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh sejauhmana proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, apabila rekrutmen politik dilakukan secara serampangan maka kualitas kepemimpinan yang dihasilkan juga tidak mumpuni, sebaliknya jika kualitas rekrutmen baik maka akan menghasilkan kepemimpinan yang baik pula.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Terutama dalam pemberian kewenangan atau pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tangerang Selatan resmi memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2008 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardiyanto tanggal 29 Oktober 2008. Wilayah ini berhasil memilih walikota dan wakilnya yaitu Hj. Airin Rachmi Diany Wardana SH, MH dan wakilnya Drs. H. Benyamin Davnie yang dilantik tanggal 20 April 2011 oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (BPS Kota Tangsel, 2011).

Peta perpolitikan Kota Tangerang Selatan (2014-2019) diwarnai dengan dominasi Partai Golkar dan PDIP. Kedua partai ini mendapatkan 9 kursi DPRD. Disusul kemudian oleh Gerindra 7 kursi, Hanura 6 kursi, PKS 5 kursi, Nasdem 3 kursi, PKB 3 kursi, PAN 3 kursi, Demokrat 3 Kursi dan PPP 2 kursi (KPU Tangsel). Dilihat dari perolehan suara tersebut tampak bahwa PKS cukup kuat di Tangsel dengan menjadi partai menengah mengalahkan dominasi Partai Demokrat dan PKB, PAN dan PPP.

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Periode 2014-2019 Kota Tangerang Selatan menurut Partai

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Presentase %
1	GOLKAR	121.868	9 Kursi	18
2	PDIP	113.238	9 Kursi	18
3	GERINDRA	79.844	7 Kursi	14
4	HANURA	49.771	6 Kursi	12
5	PKS	48.537	5 Kursi	10

6	NASDEM	46.996	3 Kursi	6
7	PKB	41.025	3 Kursi	6
8	PAN	35.195	3 Kursi	6
9	DEMOKRAT	34.130	3 Kursi	6
10	PPP	33.693	2 Kursi	4
11	PKPI	10.608	Tidak dapat	1.2
12	PBB	7.839	Tidak dapat	1.7
Jumlah		622.744	50	100

Sumber: KPUD Kota Tangerang Selatan.

Dari tabel (1) ini tampak bahwa dalam pemilu 2014, PKS menempati urutan 5 besar di Kota Tangerang Selatan dengan mendapatkan suara sah sebanyak 48.537 suara (6 dapil) dengan 5 kursi DPRD Kota Tangsel. Secara keseluruhan perolehan kursi PKS cukup merata dengan mendapatkan 1 kursi untuk setiap dapil, kecuali dapil II (Serpong Utara), PKS tidak mendapat kursi dari 5 kursi yang diperebutkan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu kontestan dalam pemilu 2019, partai berbasis massa Islam terpelajar ini sering disebut sebagai partai kader atau partai ideologi¹. Ada dua indikasi kenapa PKS disebut sebagai partai kader. Pertama, Pimpinan partai yang bersifat sentralitas dan ketaatan kepada pemimpin partai merupakan bagian dari doktrin politik. Kedua, PKS sangat menjaga kemurnian doktrin politik yang dianutnya dengan jalan mengadakan saringan (rekrutmen) terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyimpang dari garis kebijakan partai yang telah ditetapkan.

Model rekrutmen caleg di PKS pun dilakukan dengan cara penugasan (*assignment*) bukan mencalonkan diri. Dengan kata lain, caleg yang diusung PKS adalah seorang kader yang ditugaskan oleh struktur partai untuk berjuang di ranah politik. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa proses rekrutmen caleg PKS tidak menyandarkan kepada popularitas dan elektabilitas seorang tokoh. Adakalanya caleg yang dimunculkan justru orang yang tidak terkenal dan mempunyai keterbatasan finansial. Sistem kaderisasi partai (rekrutmen politik) di PKS inilah yang membedakan dengan sistem rekrutmen pada partai politik lain di Indonesia.

Pada beberapa partai politik di Indonesia, sistem rekrutmen dan proses penjangkaran caleg dilakukan dengan cara memasang iklan di berbagai media massa nasional dan lokal. Sistem rekrutmen terbuka ini untuk DPR, DPRD tingkat provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Segmennya beragam mulai dari petani, buruh, nelayan, intelektual, akademisi hingga ibu-ibu boleh mendaftar. Sistem rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh partai politik diharapkan mampu menampung caleg yang berkualitas sehingga berpengaruh pada elektabilitas partai menjelang pemilu 2019.

Dari pemaparan tersebut tampak bahwa model rekrutmen dan sistem penjangkaran caleg PKS Kota Tangsel dilakukan secara tertutup (tanpa gembar-gembor) dengan menimbang aspek kaderisasi (*tarbiyah*), level keanggotaan, senioritas dan kontribusi pada partai. Sedangkan faktor-faktor lain seperti popularitas, elektabilitas, dan kemampuan finansial yang menjadi syarat utama untuk terpilih terkadang diabaikan.

Penelitian tentang PKS telah banyak dilakukan oleh para sarjana ilmu sosial dan ilmu politik baik oleh sarjana Indonesia maupun oleh para sarjana luar. Masing-masing dari para sarjana ini mempunyai pendekatan dan kepentingan yang berbeda. Tidak satupun dari mereka yang dapat mengklaim bahwa pendekatan yang mereka gunakan adalah pendekatan yang paling benar dalam meneliti tentang PKS. Sebagian besar penelitian tentang PKS lebih banyak membahas dalam konteks PKS secara umum (Partai politik). Literatur yang menulis tentang PKS ialah:

1. Yon Machmudi (2005), *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Merupakan riset doktoralnya di Australian National University. Yon Machmudi mengajukan sebuah konteks baru yang menempatkan PKS sebagai alternatif baru dalam membedakan berbagai tipe rivalitas Islam

¹ Ada banyak asumsi yang seringkali tidak tertulis dan berkembang dalam pelbagai wacana diskursif di Barat yang membedakan secara diametral antara partai politik Islam dan gerakan Islam. Partai politik Islam didefinisikan sebagai dimensi konvensional mekanisme politik formal, sedangkan gerakan sosial Islam dinilai beroperasi dalam wadah politik non formal. Partai politik diandalkan sebagai bagian inheren politik yang terinstitusionalisasi secara normal, dimana para aktivisnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjadi kandidat dalam pemilihan pejabat publik, melakukan agregasi kepentingan publik melalui aktivitas lobi, legislasi, dan sebagainya. Lihat Burhanudin Muhtadi dalam "Dilema PKS: Suara dan Syariah". Hal.3.

dalam konteks Indonesia kontemporer. Dengan pendekatan yang multidisiplin, kehadiran PKS ditelaah dalam *frame work* kontribusi anak bangsa dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan bangsa.

2. Burhanuddin Muhtadi (2012), Dilema PKS: *Suara dan Syariah*. Merupakan tesis Burhanuddin Muhtadi di Australian National University. Memotret fenomena PKS dari sudut pandang keilmuan, mulai dari asal-usulnya sebagai jamaah *Tarbiyah* pada masa Orde Baru, pengaruh ideologis dari Ikhwanul Muslimin Mesir, Pendirian Partai Keadilan pada awal reformasi, sampai dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Juga dibahas mengenai strategi PKS memperjuangkan agenda politik Islamis nya di panggung politik Indonesia.
3. Muhammad Nuh Ismanu & Chusnul Mar'iyah (2020), Faktor-faktor internal kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji bagaimana faktor internal berpengaruh terhadap kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pemilihan DPRD Kota Depok. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan PKS dalam Pemilu 2019, khususnya pada pemilihan DPRD Kota Depok tidak lepas dari adanya pengaruh internal partai, yaitu ideologi Islam konservatif serta peran kader dan pengurus PKS Kota Depok.

Mengacu pada literatur di atas, Penelitian yang lebih spesifik tentang pola rekrutmen PKS di tingkat lokal (daerah) masih sangat sedikit. Di sini letak pembeda dan signifikansi dari penelitian ini.

Masalah model rekrutmen calon legislatif menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif Ilmu Politik karena proses rekrutmen berkaitan dengan kualitas anggota dewan dan lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik bagi Indonesia. Secara khusus model rekrutmen secara tertutup yang dianut oleh PKS juga kerap diperhadapkan dengan model rekrutmen terbuka yang dianut oleh partai politik lainnya di Indonesia.

Penelitian ini berlandaskan pada rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan : Bagaimana model rekrutmen calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan pada pemilu Legislatif 2019; Sejauhmana pengaruh model rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan dalam menghasilkan anggota dewan yang berkualitas; Apakah model rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan kader yang berkualitas dapat mendorong peningkatan perolehan suara partai; Apakah model rekrutmen calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan menggambarkan pelembagaan partai politik yang baik.

Secara khusus tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pola rekrutmen calon anggota legislatif PKS dan pengaruhnya terhadap *output* anggota dewan yang berkualitas yang mendorong peningkatan suara partai dan pelembagaan partai politik yang baik..

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini kualitatif, Penelitian ini mengacu pada teknik wawancara mendalam dan studi literatur, berbagai literatur tertulis digunakan sebagai data dalam memperkuat hasil wawancara, seperti berbagai buku/literatur, jurnal dan liputan media massa yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya instrumen terpenting dari proses rekrutmen politik adalah kaderisasi dan seleksi kepemimpinan. Di partai manapun, kaderisasi adalah urat nadi bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Rekrutmen politik berfungsi mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Hal ini berarti partai menjadi wadah rekrutmen politik (kader) dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa baik level lokal maupun nasional. Calon pemimpin harus lahir dari proses kaderisasi partai yang berkesinambungan dan terus menerus tiada henti, agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi partai secara lebih baik.

Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Legislatif 2019 di Kota Tangerang Selatan

Peta perpolitikan Kota Tangerang Selatan pada periode 2014-2019 diwarnai dengan dominasi Partai Golkar dan PDIP di parlemen (DPRD) dengan perolehan 9 kursi, yang diikuti oleh partai Gerindra

7 kursi, Hanura 6 kursi, PKS 5 kursi, Nasdem 3 kursi, PKB 3 kursi, PAN 3 kursi Demokrat 3 kursi, dan PPP 2 kursi (lihat tabel 1).

Tabel 2. Distribusi kursi DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2014-2019

No	Partai	Jumlah Kursi
1	GOLKAR	9 Kursi
2	PDIP	9 Kursi
3	GERINDRA	7 Kursi
4	HANURA	6 Kursi
5	PKS	5 Kursi
6	NASDEM	3 Kursi
7	PKB	3 Kursi
8	PAN	3 Kursi
9	DEMOKRAT	3 Kursi
10	PPP	2 Kursi
11	PKPI	Tidak dapat
12	PBB	Tidak dapat
Jumlah		50

Sumber: KPUD Kota Tangerang Selatan.

Dari tabel di atas tampak bahwa dalam pemilu 2014, PKS menempati urutan 5 besar di Kota Tangerang Selatan dengan mendapatkan suara sah sebanyak 48.537 suara (6 dapil) dengan 5 kursi DPRD Kota Tangsel. Secara keseluruhan perolehan kursi PKS cukup merata dengan mendapatkan 1 kursi untuk setiap dapil, kecuali dapil II (Serpong Utara), PKS tidak mendapat kursi dari 5 kursi yang diperebutkan.

Pada pemilu serentak 2019 persaingan politik di Tangerang Selatan cukup ketat, terutama dalam pemilihan legislatif (pileg 2019). Pergeseran dalam berebut kursi pun tampak terjadi di parlemen DPRD Tangsel. Sejumlah partai mengalami pergerakan dengan menambah kursi legislatif DPRD Tangsel. Ada juga sejumlah partai justru perolehan kursinya merosot, bahkan ada pula yang tidak dapat kursi sama sekali jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2014.

Tabel 3. Distribusi kursi DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2019-2024

No	Partai	Jumlah Kursi
1	GOLKAR	10 Kursi
2	PKS	8 Kursi
3	GERINDRA	8 Kursi
4	PDIP	8 Kursi
5	DEMOKRAT	5 Kursi
6	PKB	4 Kursi
7	PSI	4 Kursi
8	PAN	2 Kursi
9	HANURA	1 Kursi
Jumlah		50

Sumber: KPUD Kota Tangerang Selatan.

Dari kedua tabel di atas (tabel 2 dan 3) tampak bahwa terjadi konfigurasi politik yang cukup signifikan di Kota Tangsel. Partai Golkar, Gerindra, PKB masing-masing menambah satu kursi di DPRD Tangsel. Sedangkan PKS dan Demokrat justru meambah kursi di pileg tahun 2019. Untuk PKS menambah tiga kursi dan Demokrat menambah dua kursi. PSI sebagai partai baru justru membuat kejutan dengan mendelegasikan empat kader terbaiknya di DPRD Tangsel. Selain partai di atas yang mengalami peningkatan suara terdapat beberapa partai yang mengalami penurunan kursi DPRD. PDIP hanya mendapat delapan kursi (turun satu kursi di banding periode lalu), PAN hanya mendapat dua kursi (berbeda pada periode lalu PAN berhasil memperoleh tiga kursi DPRD). Hanura harus kehilangan lima kursi sekaligus (dari enam kursi menjadi 1 kursi). Adapun PPP dan Nasdem yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf justru harus tersingkir dari kursi parlemen DPRD Tangsel periode 2019-2024.

Peningkatan kursi PKS pada pemilu legislatif 2019 di kota Tangsel ini menarik untuk dianalisis, sebab beberapa variabel justru menunjukkan bahwa PKS akan mengalami penurunan suara pada pemilu serentak 2019, seperti; pendapat para pengamat politik, hasil survey beberapa lembaga survey yang menempatkan PKS di bawah 4% suara nasional, sikap PKS terhadap pemerintah (oposisi) dan konflik internal (munculnya GARBI, pemecatan massal kader PKS di beberapa daerah, dll).

Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan Pada Pemilu 2019

Rekrutmen politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan sistem politik terutama mencakup keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Rekrutmen politik mencakup pemilihan seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik khususnya dalam penelitian ini adalah sebagai anggota legislatif di tingkat daerah (DPRD).

Adapun dua mekanisme dalam rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan tertutup (Prihatmoko: 2005). dalam sebuah kompetisi rekrutmen tertutup kesempatan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang, dan pola proses rekrutmen hanya sebatas pada sekelompok elite tertentu.

PKS mempunyai kebijakan dalam rekrutmen politiknya secara tertutup. Model rekrutmen caleg di PKS dilakukan dengan cara penugasan (*assignment*), sehingga berbeda dengan partai-partai lainnya yang mencalonkan diri. Caleg yang diusung PKS adalah seorang kader yang ditugaskan oleh struktur partai untuk maju dan berjuang di ranah politik. Mengacu pada perbedaan yang khusus ini, proses rekrutman caleg PKS tidak menyandarkan kepada popularitas dan elektabilitas ataupun nepotisme dan keunggulan dari sisi modalitas ekonomi.

Hal inilah yang membedakan sistem kaderisasi partai (rekrutmen politik) PKS dengan sistem rekrutmen partai-partai politik lain di Indonesia. Sebuah sistem rekrutmen tertutup, pada umumnya hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang ada di lingkungan partai tersebut (kader) dan pola proses rekrutmen hanya sebatas pada sekelompok elite (kader) tertentu. Namun istimewanya di PKS, integritas ujian kualitas sangat diutamakan, dimana nilai moral dalam bermasyarakat serta visi yang melekat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Syarat seseorang menjadi caleg dari PKS dijelaskan oleh Sri Lintang Rosi Aryani (Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi PKS) yaitu melalui mekanisme anggota partai, mempunyai kapabilitas minimal dalam komunikasi, mempunyai jejaring yang cukup luas di dapilnya dan mempunyai kemampuan legislasi (wawancara dengan Aryani, 2019).

Ahmad Sugiri (Ketua DPC Pondok Aren dan Calon Anggota Legislatif Dapil 5 Pondok Aren) menjelaskan mengenai model rekrutmen PKS di Tangerang Selatan, menurutnya proses penjangkaran calon anggota legislatif diawali dengan adanya masukan dari semua kader yang ada di Pondok Aren. Kemudian diadakan seleksi, yang akan diusulkan kepada DPD. Penilaian mengacu pada aspek yang ada di masyarakat, apakah kader tersebut dikenal masyarakat atau tidak. Proses seleksi diutamakan dari kader, yang memiliki potensi dan dikenal oleh masyarakat. Jika seleksi kader tidak terpenuhi maka bisa diambil dari eksternal, namun syaratnya perolehan suara PKS harus banyak di wilayah tersebut. Pandangan ini diperkuat dengan Edi Nasirun yang menjelaskan bahwa untuk calon eksternal kewenangannya ada di DPD, sedangkan dari pihak internal tidak memiliki kewenangan itu, karena DPD punya perhitungan sendiri tentang kebutuhan caleg eksternal (wawancara dengan Sugiri, 2018). Proses penjangkaran dalam rekrutmen calon anggota dewan di Tangsel melibatkan Ketua DPD, dimana di setiap masing-masing wilayah ada penanggungjawab yang disebut kordapil. Ketua DPD dan kordapil menjadi penanggung jawab proses penjangkaran calon anggota dewan.

Edi Nasirun (Caleg DPRD PKS Dapil 5), menjelaskan mengenai proses penjangkaran caleg di Tangerang Selatan untuk Pileg 2019, sudah dimulai sebelum tahun 2018 di tingkat kader PKS. Satu kader memilih sepuluh nama yang menurut mereka memiliki kemampuan yang pantas diajukan menjadi caleg. Nama-nama itu kemudian disatukan dalam struktur di tingkat DPRa, diolah di tingkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan. Kemudian DPD melakukan verifikasi data, dari pendidikan, ekonomi, dan kepemilikan basis massa. Berdasarkan kualifikasi DPD kemudian mereka menghubungi secara personal untuk meminta pernyataan ketersediaan mereka untuk dicalonkan (wawancara dengan Nasirun, 2018). Pendapat dari Nasirun diperkuat dengan penjelasan Aryani mengenai penjangkaran calon yaitu dilakukan paling lambat dua tahun sebelum pemilu, untuk pemilu 2019 maka penjangkaran dilakukan paling lambat 2017. Kemudian terkait dengan proses penjangkaran yang sudah dilakukan dua tahun sebelum pemilu dengan mekanisme internal tidak melalui media, iklan dan lainnya.

Menurut Agus Winarjo (Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan) sistem dan proses penjangkaran calon anggota legislatif PKS di Tangerang Selatan ada beberapa tahapan yaitu pertama melalui Pemira lewat group-group pengkaderan di PKS dan mekanismenya lewat struktur DPRa, DPC dan DPD. Syarat menjadi caleg di PKS pertama, minimum di group dua, mempertimbangkan kelayakan untuk dicalonkan. Kedua, melihat kondisi dilapangan, di masyarakat seperti apa caleg ini, penerimaan masyarakat seperti apa, ini juga menjadi pertimbangan (wawancara dengan Winarjo, 2019).

Mengenai proses sosialisasi rekrutmen, di PKS terdapat informasi internal, dimana setiap minggu ada *update* informasi, salah satunya pemilu internal. Pemilihan ini bukan hanya memilih bakal calon anggota dewan tapi juga memilih struktur dan ketua DPD, DPW dan DPP melalui pemilu internal, sehingga di PKS sudah terbiasa diberikan informasi secara terus menerus.

Sosialisasi rekrutmen dijelaskan lebih detail oleh Sugiri, yaitu adanya kegiatan pertemuan tiap minggu yang dinamakan *halaqoh* (sekarang UPA), dimana masing-masing kelurahan mempunyai satu grup yang mewadahi. Dari situ biasanya kita punya sampel, lembaran survei yang mendata tentang siapa yang diusulkan warga untuk dijadikan sebagai CAD kedepannya. Artinya ada *wish-wish* (keinginan-keinginan) yang sudah disiapkan dari internal PKS (wawancara dengan Sugiri, 2018).

Ahmad Sugiri lebih jauh menjelaskan bahwa komponen utama yang dinilai dalam *fit and proper test* bagi caleg PKS adalah mengacu pada basis sosial. Salah satu kendala bagi calon adalah masalah ekonomi, karena hampir semua caleg tingkat ekonominya berasal dari kalangan menengah atau menengah kebawah. Kendala di bidang ekonomi dapat dibantu dengan kekuatan basis massa yang bisa menggerakkan dan mendatangkan suara bagi PKS di wilayah tersebut menjadi pertimbangan tersendiri (wawancara dengan Sugiri, 2018).

Permasalahan ekonomi yang dimiliki oleh caleg PKS, menurut Ahmad Sugiri PKS akan membantu dan *support* melalui struktur, yaitu struktur DPRa dan pengurus yang akan membantu dengan potensi kader yang ada di wilayah tersebut. Kemudian PKS memiliki tim pendamping yang akan *memback up* semua kegiatan di DPRa, diantaranya pos-pos yang ada di struktur dan tim pendamping diharapkan bisa *mensupport* calon anggota dewan dengan dana yang sumbernya dari anggota partai.

Edi Nasirun mempunyai pendapat mengenai faktor finansial, basis massa yang harus dimiliki oleh caleg dari PKS saat dilakukannya *fit and proper test* yaitu, DPD akan melihat kader-kader yang terpilih dari bawah dan mempertimbangkan banyak faktor termasuk finansial, basis massa, status sosial dan pendidikan. DPD akan menghubungi kader yang memenuhi persyaratan. Sebagai caleg pasti memerlukan uang karena bersilaturahmi dengan masyarakat membutuhkan uang sehingga kader harus memiliki biaya operasional sendiri (wawancara dengan Nasirun, 2018).

Kemudian mengenai pembiayaan calon anggota legislatif, karena PKS adalah partai kader maka seluruh beban yang diamanahkan di pundak seorang kader akan ditopang bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing kader, tidak harus dengan uang namun bisa juga dengan tenaga, atau bisa juga dengan tandem dengan caleg lainnya, dalam proses sosialisasi kepada masyarakat saling membantu.

Pendapat lain dari Winarjo mengenai masalah caleg dengan sumber finansial yang minim yaitu selain kapasitas, segi finansial juga diperlukan namun tidak dominan selama caleg tersebut mempunyai jaringan yang bagus akan dipertimbangkan untuk dipilih. Pertimbangannya di PKS saling sinergi, caleg yang memiliki basis sosial yang bagus akan di *back up* agar dapat bergerak secara optimal, terutama melalui jaringan-jaringan keluarganya (wawancara dengan Winarjo, 2019).

Pandangan Aryani mengenai pengaruh faktor finansial dalam proses penunjukkan menjadi calon anggota legislatif memperkuat pandangan narasumber lainnya. Menurutnya faktor basis sosial ada, yaitu dalam bentuk jejaring sosial yang luas, misalnya sebagai tokoh masyarakat, memiliki organisasi, mempunyai kemampuan komunikasi sedangkan faktor finansial nomor dua (wawancara dengan Aryani, 2019).

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai buku panduan PKS BCAD, sebagai Platform bakal calon anggota dewan. PKS BCAD adalah platform digital yang digunakan untuk mengirimkan data Bakal Calon Anggota Dewan secara digital agar dapat masuk kedalam proses penjangkaran digital. Mekanisme penjangkaran juga harus melalui tahapan ini.

Model Rekrutmen dan Pelembagaan Politik

Persoalan partai politik di Indonesia saat ini salah satunya adalah kaderisasi, dimana proses kaderisasi dan pendidikan politik masih lemah, meskipun begitu ada beberapa partai politik sudah melakukan kaderisasi berjenjang diantaranya PKS. Kemudian fenomena kader partai yang pindah dari

satu partai ke partai lain, menunjukkan bahwa kaderisasi yang dilakukan partai politik belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat. Kaderisasi menjadi problem besar di partai politik. Untuk melakukan kaderisasi dan memberikan pendidikan politik pada anggota partai tidak mudah karena membutuhkan biaya yang besar.

Permasalahan kelembagaan partai sangat penting karena berhadapan dengan tuntutan masyarakat yang besar. Terdapat sejumlah faktor yang membuat tingkat kelembagaan belum berkembang dengan baik, partai-partai yang ada umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Selain itu partai-partai kerap mengalami konflik yang menguras tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelembagaan partai politik. Elite-elite partai belum menjadikan AD/ART sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik.

Menurut Sitaresmi yang mengutip pandangan Richard S Katz dan William Crotty dalam pengelompokan partai-partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk kategori partai kader. Dari sisi tipologi partai politik menurut Maurice Duverger mengacu pada sistem rekrutmennya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk partai *cell* yang sistem rekrutmennya mirip dengan partai komunis, dimana kualitas rekrutmen sebagai hal yang utama dibandingkan dengan kuantitasnya dan bersifat sentralistik (Soekanto, 2016).

Ada beberapa jalur rekrutmen untuk menjadi *supporter*, member dan aktivis di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu untuk *supporter* disebut sebagai simpatisan, member atau anggota terbina, baik anggota pendukung maupun inti. Sesuai dengan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera lebih terbuka karena memiliki jumlah anggota yang relatif besar, walau keanggotaannya tetap bersifat eksklusif.

Dalam AD/ART Partai keadilan Sejahtera (PKS) jenjang keanggotaan partai terdiri dari anggota Pendukung (anggota Pemula dan anggota Siaga), anggota Penggerak (anggota Muda dan anggota Pratama), dan anggota Pelopor (anggota Madya, anggota Dewasa dan anggota Utama).

Model rekrutmen yang telah dijalankan oleh PKS selama ini idealnya harus menjadi role model dalam pelembagaan politik di Indonesia, karena partai politik dapat memainkan fungsinya dalam mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah.

Pelembagaan partai politik menurut Huntington adalah proses pementasan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung (Huntington, 1968).

Kaitannya dengan perhelatan politik pemilu legislatif (Pileg) posisi kader partai politik sangat penting, karena berhubungan dengan upaya partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal untuk melakukan rekrutmen dalam memilih dan menetapkan calon anggota yang akan mewakili partai dan menjadi penghubung kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

Rekrutmen partai politik menjadi fungsi utama partai dalam rangka menjalankan perannya sebagai *intermediary agent* atau penghubung antara warga negara dengan negara dalam bingkai representasi politik. Melalui rekrutmen politik, partai politik mampu mengantarkan warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.

Pengaruh Model Rekrutmen terhadap Anggota Dewan Berkualitas

Ada beberapa pandangan yang menjelaskan adanya korelasi mengenai anggota dewan dengan kualitas yang baik dengan model atau proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

Ahmad Sugiri (Ketua DPC Pondok Aren) menjelaskan bahwa PKS dalam mencalonkan kader sebagai anggota legislatif tidak sembarangan, artinya semua kader yang dicalonkan PKS mempunyai potensi besar untuk merubah daerah pemilihannya ke arah yang lebih baik (Wawancara dengan Sugiri, 2018).

Lebih jauh Edi Nasirun (Caleg DPRD PKS Dapil 5) menjelaskan bahwa proses rekrutmen yang sudah dijalankan oleh PKS sudah mempunyai *ouput* dapat menghasilkan wakil rakyat yang mempunyai kualitas, tinggal mereka belajar di lapangan. PKS sudah memberi yang terbaik bagi masyarakat, tingkat kepedulian kader PKS ke masyarakat itu luar biasa (Wawancara dengan Nasirun, 2018).

Kemudian Sri Lintang Rosi Aryani (Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi PKS) memperkuat pandangan di atas yaitu caleg PKS yang kompeten didapat karena ada masa dua tahun yang dimanfaatkan dengan pembekalan. Ketika sudah menjadi anggota dewan, umumnya akan belajar cepat dan saling berbagi ilmu sehingga kompetensi akan dihasilkan (Wawancara dengan Aryani, 2019).

Pandangan lain didapat dari Mustofa (Anggota DPRD PKS Kota Tangerang Selatan) yang menjelaskan bahwa sistem yang dilakukan PKS adalah sistem yang terbaik, karena partai yang

memberikan mandat kepada caleg karena sudah mengetahui karakter, kemampuan dan rekam jejak caleg yang diusungnya, sehingga harapan mendapatkan anggota dewan yang berkualitas mempunyai relevansi dengan proses kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan oleh PKS (Wawancara dengan Mustofa, 2019).

Siti Chadijah (Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan) mempunyai pandangan yang beralasan bahwa Caleg PKS dipilih dari amanah kader, mendengar apa yang diinginkan kader, sehingga ketika terpilih sebagai anggota dewan orientasinya adalah pengabdian (Wawancara dengan Chadijah, 2019).

Mengacu pada pandangan dari narasumber di atas dapat disimpulkan PKS mempunyai proses kaderisasi dan rekrutmen yang sudah terstruktur sesuai dengan platform partai yaitu panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai, sehingga setiap caleg yang terpilih sebagai anggota legislatif mempunyai kompetensi sebagai anggota dewan yang berkualitas.

Model Rekrutmen berkualitas dan Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan dalam Pileg 2019

Mengacu pada hasil pemilu legislatif Kota Tangerang Selatan 2014-2019, PKS mendapat perolehan jumlah suara sebanyak 48.537 (10%) atau mendapat 5 kursi. Posisi secara keseluruhan PKS menempati urutan ke 5 besar, dengan perolehan kursi cukup merata yaitu 1 kursi untuk setiap dapil, kecuali untuk dapil II (Serpong Utara, PKS tidak mendapatkan suara (lihat tabel 4.2).

Pada pemilu legislatif 2019, terjadi perubahan atau pergeseran perolehan kursi dalam parlemen DPRD Kota Tangerang Selatan dari partai-partai yang ada. Diantaranya dialami oleh PKS yang mengalami kenaikan cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif 2014, yaitu memperoleh 8 kursi, dimana posisi perolehan suara PKS sama dengan yang diperoleh oleh Gerindra dan PDIP, dibawah Golkar (lihat tabel 4.3).

Berdasarkan hasil pemilu legislatif Kota Tangerang Selatan 2019 di atas dimana PKS mendapatkan kenaikan perolehan suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan partai-partai lainnya sebagai kompetitor. Sebelum pelaksanaan pileg dilaksanakan ada beberapa pandangan yang mencoba memprediksi bahwa perolehan suara PKS akan mendapatkan tantangan dalam pileg 2019 karena beberapa alasan yang melingkupinya. Diantaranya masalah perpecahan elite partai dengan hadirnya Garbi, masalah kepemimpinan yang terkena masalah hukum dan lainnya.

Namun prediksi tersebut dapat terbantahkan oleh adanya kenaikan perolehan suara PKS dalam Pileg 2019 baik di tingkat nasional maupun khususnya untuk Kota Tangerang Selatan.

Pandangan empirik dari Iding Rasyidin (Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta) menjelaskan mengenai adanya peningkatan perolehan suara PKS dalam Pileg 2019 yaitu kasus PKS adalah kasus tersendiri, mengalami anomali karena diprediksi akan mengalami penurunan, tetapi hasilnya adalah peningkatan suara yang sangat signifikan. Iding menjelaskan bahwa peningkatan perolehan suara yang dialami oleh PKS dalam Pileg 2019 tidak melulu berkaitan dengan proses rekrutmen tetapi karena adanya politik identitas. Salah satu argumennya adalah adanya kalangan yang tadinya tidak pernah ikut pemilu sekarang ikut pemilu, katakanlah HTI, yang diduga mereka menyalurkan suaranya ke PKS. Sehingga Iding menyimpulkan kenaikan perolehan suara PKS bukan karena rekrutmen tetapi karena adanya keuntungan dari situasi politik saat itu (Wawancara dengan Rasyidin, 2019).

Pandangan lain memperkuat pandangan di atas yaitu dari Luthfi Makhasin, (Pengamat Politik Universitas Jendral Soedirman) yang menjelaskan bahwa ada konteks elektoral yang berbeda dari sebelumnya yaitu ada polarisasi politik yang sudah kadung dikondisikan sangat *fragmented* orang menggunakan identitas keagamaan dengan sangat vulgar dan menjadi salah satu, bahkan instrumen utama menggalang dukungan (Wawancara dengan Makhasin, 2019).

Menurut Makhasin lebih jauh, dalam konteks kontestasi elektoral yang seperti itu, partai-partai ideologis seperti PKS menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan karena garis ideologis yang ketat ditengah kontestasi elektoral yang sangat terpolarisasi dengan identitas keagamaan itu bisa dimanfaatkan PKS dengan sangat efektif, untuk menunjukkan bahwa dia adalah kekuatan politik yang paling bisa mewakili kepentingan orang. Dan kasus di Tangerang saya kira tidak mengejutkan karena ini terjadi di banyak tempat lain. Secara umum, perolehan PKS di 2019 ini adalah satu perolehan paling fenomenal ditengah hujatan yang begitu tinggi terhadap perilaku elite politiknya. Tapi ini adalah saya kira ini kemenangan yang sangat luar biasa oleh PKS, Tangerang itu hanya satu representasi dari banyak daerah lain yang mengalami hal yang sama (Wawancara dengan Makhasin, 2019).

Kemudian ketika ditanyakan mengenai sistem rekrutmen caleg yang baik dalam konteks politik, Makhasin menjelaskan bahwa fungsi partai politik itu untuk rekrutmen dan dalam literatur politik modern, partai yang baik adalah partai yang ideologis. Karena kepentingan atau framing kepentingan partai modern itu memang harus punya garis ideologis yang jelas, apa yang dilakukan oleh PKS itu adalah sebuah prestasi. Bahwa partai yang menjaga garis ideologis yang jelas itu sebenarnya di Indonesia tidak pernah kehilangan basis pendukung. Masalahnya kan di Indonesia seringkali partai-partai tidak sabar untuk menjaga basis ideologisnya. Sering kali banyak berkompromi dengan banyak paham yang lain sehingga tidak nambah basis suara tapi justru kehilangan basis suara tradisionalnya. Kalau kita mau belajar dari PKS itu kekukuhan dalam menjaga garis ideologis sangat berbuah manis dalam Pemilu 2019 (Wawancara dengan Makhasin, 2019).

Ahmad Zaki, (Bendahara Umum DPD PKS Kota Tangerang Selatan) mempunyai pandangan mengenai peningkatan perolehan suara PKS yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Menurutnya faktor eksternal adalah pertama, karunia Allah SWT, ditengah kondisi PKS banyak tekanan, PKS mengalami lonjakan suara. Kedua, adanya dukungan ulama dan habaib yang tidak bisa diabaikan, yaitu dukungan Habib Riziek Shihab dan Ustad UAS yang memberikan opini ke masyarakat, saat terakhir kampanye secara jelas mendukung PKS. Ketiga, Kesadaran beragama yang meningkat, saat ini sudah bertransformasi menjadi kesadaran berpolitik dan itu baru terjadi di tahun ini dan ini tidak lepas dari pengaruh gerakan-gerakan keumatan (211, 411, 212, dll). Keempat, suara dari pendukung pak Prabowo (Wawancara dengan Zaki, 2019). Dari sisi internal, adanya militansi kader PKS, politik gagasan sesuatu yang baru ditawarkan yaitu SIM seumur hidup, STNK gratis, UU perlindungan ulama tagline itu menyasar pengguna kendaraan bermotor yang memang jumlahnya sangat banyak sehingga harapannya dengan model kampanye seperti itu mampu merekut suara masyarakat (Wawancara dengan Zaki, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Proses kaderisasi PKS dilakukan secara tertutup dengan cara penugasan (*assignment*), tidak dengan mencalonkan diri. Caleg yang diusung PKS adalah seorang kader yang ditugaskan oleh struktur partai untuk berjuang dan dapat terpilih sebagai anggota legislatif (pusat dan daerah). Secara umum proses rekrutmen caleg PKS tidak berdasarkan kepada popularitas dan elektabilitas seorang tokoh. Berdasarkan data empiris, adakalanya caleg yang dimunculkan seseorang yang tidak terkenal dan mempunyai keterbatasan secara finansial namun PKS mempunyai pertimbangan tersendiri untuk memilih seorang caleg. Sistem/model kaderisasi partai (rekrutmen politik) PKS inilah yang membedakan dengan sistem rekrutmen pada partai politik lain yang umumnya dilakukan secara terbuka.

Berdasarkan data empiris didapati relevansi antara model rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan yang mengacu pada penugasan (*assignment*) dalam menghasilkan anggota dewan yang berkualitas. Kader yang terpilih sebagai caleg dalam mekanisme PKS di Kota Tangerang Selatan telah melewati tahapan penilaian yang berjenjang. Secara empiris sistem kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan PKS telah berjalan dengan baik. PKS ketika memberikan mandat kepada caleg dengan penilaian yang matang karena sudah mengetahui karakter, kemampuan dan rekam jejak caleg yang diusungnya. Caleg PKS dipilih dari berdasarkan amanah kader, mendengar apa yang diinginkan kader, sehingga ketika terpilih sebagai anggota dewan orientasinya adalah pengabdian, sehingga harapan mendapatkan anggota dewan yang berkualitas mempunyai relevansi dengan proses kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan oleh PKS.

Dalam mencermati hasil perolehan suara PKS dalam pemilu legislatif 2019 di Kota Tangerang Selatan, didapati hasil yang cukup fenomenal yaitu terjadi peningkatan perolehan suara yang signifikan yaitu dari 5 kursi (2014) menjadi 8 kursi (2019). Peningkatan perolehan suara ini tentu dapat dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota dewan PKS pada periode terdahulu yang telah dapat meyakinkan masyarakat Kota Tangerang Selatan melalui kinerjanya yang baik. Pada sisi lain, peningkatan perolehan suara juga merupakan bukti adanya kepercayaan masyarakat Kota Tangerang Selatan kepada caleg-caleg yang dipilih oleh PKS dalam Pileg 2019 untuk mewakili kepentingan mereka. Hal ini menggambarkan bahwa model rekrutmen yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan telah berhasil menghadirkan kader yang berkualitas, yang dapat mendorong adanya peningkatan perolehan suara partai.

Mengenai adanya peningkatan perolehan suara PKS dalam Pileg 2019 di Kota Tangerang Selatan, selain pandangan adanya peran dari proses kaderisasi, rekrutmen dan kader yang berkualitas, ada pula pandangan lain yang mengkaitkan dengan perkembangan atau pengaruh dari pilkada DKI Jakarta 2017 dan politik di tingkat pusat (nasional), sehingga PKS mendapat keuntungan dimana suara masyarakat Kota Tangerang Selatan beralih memilih PKS.



Dalam dinamika partai-partai politik di Indonesia pasca reformasi, PKS kerap dijadikan model dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang tertutup, telah melembaga dan berjalan dengan baik. Pelembagaan partai politik menurut Huntington adalah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Permasalahan kelembagaan partai sangat penting karena berhadapan dengan tuntutan masyarakat yang besar, hal ini telah dipenuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempunyai kebijakan khusus mengenai model kaderisasi dan rekrutmen calon anggota legislatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, Ian. (2004). *Ideologi Politik Mutakhir*. Yogyakarta: CV.Qalam
- Afrizal.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Almond, Gabriel. (1993). *Sosialisasi, kebudayaan dan partisipasi politik*. Dalam Mochtar Mas'ood & Colin MacAndrews. Perbandingan sistem politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Sekretariat Jenderal DPP PKS. Tahun 2021
- Mas'ood & Colin MacAndrews. Perbandingan sistem politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Chilcote, Ronald H. (2004). *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cole, Alexandra. (2013). *Perbandingan Partai Politik: Sistem dan Organisasi*. Dalam *Ilmu Politik dalam paradigma abad ke-21*. Editor: Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning. Jakarta: Kencana
- Darmawan, Ikhsan. (2013). *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dhakidae, Daniel. (1999). *Partai Politik Indonesia Ideologi Strategi dan Program*. Jakarta: Kompas
- Efriza. (2012). *Political Explore. Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Huntington, P. Samuel. (2004). *Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang Berkembang*. Jakarta: Pen. PT Rajawali grafindo Persada.
- (1968). *Political Order in Changing Societies* New Haven. Yale University Press.
- Kraus, Jeffry & Wagner College. (2013). *Partai Politik Amerika. Dalam Ilmu Politik dalam paradigma abad ke-21*. Editor: Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning. Jakarta: Kencana
- Machmudi, Yon (2005). *Partai Keadilan Sejahtera: "Wajah Baru Islam Politik Indonesia"*. Bandung: Penerbit. Harakatuna Publishing
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pen. PT Remaja Rosda Karya. Cet.ke-36
- Muhtadi, Burhanudin. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Pen. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Romli, Lili. (2008). *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, *Jurnal Penelitian Politik Indonesia Institute of Sciences Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 5 (1), 21-30.
- Rush, Michael & Philip Althoff. (2003). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Sitaesmi S. (2013). *Partai Politik dan Rekrutmen Politik Menjelang Pemilu 2014*. Jakarta: IISIP Jakarta, dalam bahan seminar yang disampaikan pada pekan seminar Ilmu Politik IISIP Jakarta, 5 Mei 2013
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Pen. Alfabeta Cet. Ke-26 Oktober.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu politik*. Jakarta:Penerbit Grasindo
- Usman, Husaini dan Purnomo Akbar.2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Varma, S.P. (2003). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Penerbit Grafindo
- Ware, Alan. (1996). *Political Parties and Party System*. New York: Oxford University Press
- Sahroni, Ahmad, Prisoanto, Guntur Freddy, Ernungtyas, Niken Febrina, Afriani, Anindita Lintangdesi (2019). "POLITIK TANPA MAHAR": SEMIOTIKA JARGON KOMUNIKASI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI ERA DEMOKRASI BIAYA TINGGI. *SEMIOTIKA : Jurnal Komunikasi*. Vol.

Jurnal

POLITICON: Jurnal Ilmu Politik Vol.3 No.1; Hal 34–59. Website:
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon> ISSN: 2685-6670 (Online)



Skripsi:

Baalwy, Noor Asty. (2012). *Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar*. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.

Sumber Lain:

Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2011. BPS Kota Tangerang Selatan. CV Prodata Nusaraya, 2011

Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2010. Pen: BPS Kota Tangerang 2010

Soekanto, Sitaresmi S. (2013). *Partai Politik dan Rekrutmen Politik Menjelang Pemilu 2014*. Jakarta: IISIP Jakarta, dalam bahan seminar yang disampaikan pada pekan seminar Ilmu Politik IISIP Jakarta, 5 Mei 2013

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik